

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Nur Aina Arifah ¹, Barratun Naqiyah ²

Universitas Annuqayah, Sumenep, Indonesia ⁽¹⁾

Universitas Annuqayah, Sumenep, Indonesia ⁽²⁾

nurainaarifah88@gmail.com

Received:	Revised:	Accepted:

Abstract

The main point of national education is to develop students to become a generation that is capable, skilled, creative, and obedient to God Almighty. To ensure that this is achieved, it needs to be supported by adequate facilities and infrastructure. This research aims to find out the implementation of standard facilities and infrastructure policies which include obstacles, the level of school compliance, the impact of policy implementation, factors that influence policy implementation. This research uses a qualitative approach, with case studies as the research method chosen. Apart from that, this research also uses quantitative analysis to see school compliance. Data sources involve the principal, the school environment, teachers, an inventory of items in the school. The theory used to analyze data on policy implementation and school compliance uses Dunn's theory. The research results stated that; 1) the implementation of the facilities and infrastructure policy at TKS Aengbaja Kenek is classified as quite compliant with a final score of 56. This figure shows that the school has not fully complied with the established facilities and infrastructure standards, 2) the impact is less than optimal teaching and learning processes, 3) there are two obstacles, namely from the internal side and the external side, 4) there are also two supporting factors, namely the internal side and the external side. Support from the school principal includes internal support, while parent participation includes external support.

Keyword: analisis, implementation of policies, standards, facilities and infrastructure.

PENDAHULUAN

Saat ini dunia memasuki abad ke-21, anak-anak di bawah usia 5 tahun masih belum memiliki kebijakan publik yang komprehensif untuk melindungi atau meningkatkan status mereka. Meskipun ada beberapa subkelompok dalam rentang usia tersebut yang memiliki mendapatkan kebijakan dan perhatian, misalnya anak-anak miskin dan anak-anak penyandang disabilitas, yang sebagian besar berusia muda kebanyakan tetap berada di luar payung perlindungan masyarakat. Saat ini tidak ada perangkat yang komprehensif atau kebijakan universal yang dirancang untuk memberikan perawatan menyeluruh dan peningkatan perkembangan bagi anak-anak yang lahir hingga usia 4 tahun tanpa memperhatikan keadaan individu mereka. Salah satu ciri yang paling mencolok dari program-program saat ini adalah

masih ditemukannya minimnya infrastruktur (sarana dan prasarana) untuk mendukung layanan pendidikan bagi anak dan keluarga (Gallagher & Clifford, 2000).

Padahal, usia dini (0-6 tahun) merupakan periode emas yang menentukan dan memengaruhi periode-periode sebelumnya. Masa ini sering disebut dengan fase golden age atau masa keemasan karena pada periode ini potensi kecerdasan anak berkembang lebih pesat dibandingkan pada masa tersebut periode berikutnya. Oleh sebabnya, anak usia dini sangat membutuhkan layanan pendidikan agar potensinya bisa berkembang dengan optimal. Berdasarkan Permendikbud Ristek Nomor 7 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang kemudian disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan untuk menapaki pendidikan ditahap selanjutnya.

Penjelasan mengenai infrastruktur atau sarana dan prasarana yang diperlukan oleh suatu lembaga pendidikan ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini nomor 22 tahun 2023 pasal 1 tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan guna menunjang pembelajaran proses yang teratur dan berkelanjutan. Lebih lanjut, hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226) telah dikemukakan tentang prinsip dan persyaratan infrastruktur yang harus difasilitasi oleh lembaga pendidikan anak usia dini.

Sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini adalah segala macam alat, perlengkapan, atau benda yang menunjang terselenggaranya kegiatan pendidikan, perawatan dan perlindungan sejak dini masa kecil secara optimal. Penyediaan kebutuhan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini disesuaikan dengan jumlah anak, kondisi sosial, budaya, dan jenis Dini Pelayanan Pendidikan Anak dengan prinsip aman, nyaman, memuaskan kriteria kesehatan anak, menurut tahap tumbuh kembang anak dan pemanfaatannya potensi dan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar. Fungsi sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini yaitu; melengkapi permainan lingkungan dengan sarana prasarana yang tepat untuk anak, mendukung kelancaran pembelajaran proses anak di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan menempatkan infrastruktur yang tepat dan pengembangan karakter positif pada anak (Jamaluddin, Martuty & Abdullah, 2021).

Meski begitu, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak masyarakat yang memahami terkait sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh lembaga Pendidikan Anak Usia Dini itu sesuai dengan kebutuhan anak dan tidak tahu cara mengelolanya. Padahal, pertumbuhan anak usia dini yang optimal dapat tercapai jika infrastruktur dirancang dengan memperhatikan kebutuhan anak yaitu kebebasan anak dalam melakukan aktivitas. Anak usia dini memerlukan lingkungan yang memberikan kesempatan kepada anak bergerak dengan bebas. Oleh karena itu, sangat penting bagi pendidik untuk menyediakan dan menata sarana prasarana yang memberikan rangsangan atau stimulasi motorik pada anak. Anak akan merasa bebas bereksplorasi di lingkungan jika anak merasakan adanya ketersediaan fasilitas yang aman dan nyaman. Oleh karena itu, pendidik perlu merencanakan penataan sarana prasarana yang membina minat anak dalam belajar.

Sarana prasarana di sekolah sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Sarana prasarana yang tidak lengkap akan membuat proses pembelajaran akan terhambat. Begitu juga dengan peran guru dalam proses pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Peran guru dalam proses pembelajaran antara lain sebagai informator/komunikator, pengarah dan pembimbing, inisiator, fasilitator, dan pendidik. Dalam proses belajar mengajar sebagai suatu proses yang utuh peran guru tidak dapat dikesampingkan (Ayu, 2017). Penelitian lain juga menunjukkan tentang peran guru terhadap manajemen penggunaan sarana dan prasarana untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman untuk peserta didik (Sari, dkk., 2024).

Pada titik tertentu, bahkan penting untuk melibatkan anak dalam merancang pengaturan ruang sebaik mungkin sebagai suatu pilihan yang langsung bisa memengaruhi perkembangan mereka. Anak penting untuk diminta beberapa usulan tentang cara mengatur sarana dan prasarana, mengatur ruang kelas, agar bisa menampung kebutuhan-kebutuhan mereka selama berada di sekolah. Termasuk juga, pentingnya ketersediaan pusat minat yang dirancang secara khusus. Keberadaan sarana dan prasarana yang menyangkut pusat minat, tidak bersifat statis melainkan cenderung fleksibel. Pusat minat bisa diubah-ubah. Bahan-bahan di dalam pusat minat bisa diubah untuk menjawab minat, keterampilan, dan kemampuan anak-anak yang juga berubah (Seefeldt & Wasik, 2008).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan minimnya sarana dan prasarana di pelbagai lembaga pendidikan, salah satunya problem terbatasnya anggaran. Salah satu hasil penelitian menunjukkan, Kementerian Pendidikan di Kenya mengembangkan pedoman standar layanan pendidikan untuk memandu pemangku kepentingan dalam penyediaan program pendidikan anak usia dini. Penelitian ini menyelidiki penerapan pedoman standar layanan PAUD dalam penyediaan fasilitas fisik di pusat PAUD. Kepala sekolah dan guru PAUD menjadi subjek penelitian. Kuesioner terstruktur digunakan untuk mengumpulkan data. Temuan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kepatuhan terhadap pedoman pemerintah dalam penyediaan ruang kelas dan furnitur. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kategori tersebut dalam hal kepatuhan terhadap pedoman pemerintah dalam penyediaan air, sanitasi, dan fasilitas bermain. Studi ini merekomendasikan agar dana infrastruktur diperluas ke pusat-pusat PAUD yang ada di daerah (Sitati, Ndirangu, Kennedy, 2016).

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa taman kanak-kanak, idealnya bisa menjadi ruang yang nyaman, menyenangkan, dan bereksplorasi. Lembaga-lembaga sekolah pada umumnya telah mengimplementasikan ketetapan dari pemerintah tentang sarana dan prasarana, namun pada praktiknya masih perlu adanya peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas (Madhani, & Patilima, 2024). Salah satu lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang turut mengimplementasikan ketentuan dari pemerintah tentang sarana dan prasarana yaitu TKS PGRI Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto. Dalam praktiknya, tentu ditemukan beberapa hambatan baik dari internal maupun eksternal. Bertumpu dari kenyataan itu, peneliti ingin melakukan penelitian yang bertujuan ingin mengetahui implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana di TKS PGRI Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana di TKS PGRI Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto

Kabupaten Sumenep. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif karena berbagai alasan. Desain penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan menekankan pada kedalaman eksplorasi sikap informan, pengalaman dan niat. Selain itu, menurut Creswell (1998), metode kualitatif menghasilkan berbagai ide dan pendapat yang dimiliki individu tentang isu-isu, serta bisa mengeksplorasi perbedaan sudut pandang dari tiap informan. Selanjutnya, metode ini dipilih untuk mengisi celah yang tidak terekspos oleh penelitian berbasis survei atau metode kuantitatif. Oleh karena itu, sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui secara komprehensif implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana di TKS PGRI Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

Pada konteks ini, peneliti mengacu pada proses penyelidikan yang bertujuan untuk menemukan solusi terhadap masalah-masalah praktis. Sebagaimana disampaikan oleh Dunn (2015) tujuan dari penggunaan metode analisis kebijakan publik adalah untuk membantu memahami tidak hanya penyelidikan terhadap hasil dari suatu kebijakan tetapi juga proses yang digunakan untuk menghasilkan suatu kebijakan. Analisis kebijakan secara metodologis bersifat eklektik; para peneliti bebas memilih di antara berbagai metode ilmiah, baik kualitatif maupun kuantitatif sepanjang menghasilkan pengetahuan yang dapat diandalkan.

Sumber data penelitian, terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan kunci, baik dari hasil wawancara dan observasi tentang penerapan, dampak penerapan, kendala, faktor penghambat, faktor pendukung yang memengaruhi penerapan sarana dan prasarana di lingkungan TKS PGRI Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari gambaran umum lokasi penelitian, arsip pengadaan sarana dan prasarana, dokumen-dokumen tertulis tentang profil sekolah, dan dokumentasi lain TKS PGRI Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep serta data lainnya yang diperlukan untuk kepentingan penelitian. Tempat atau lembaga yang digunakan sebagai lokus penelitian yaitu mengamati implementasi sarana dan prasarana di TKS PGRI Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Lokasi yang digunakan sebagai lokus penelitian, yaitu di dalam ruangan dan luar ruangan.

Metode yang digunakan dalam penentuan informan selain purposive sampling adalah metode convenience, informan penelitian diupayakan berasal dari lingkungan TKS PGRI Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Karena dimaksudkan bisa lebih mudah untuk mengakses kegiatan mereka sehari-hari dan lebih efisien dalam proses pengumpulan data di lapangan. Hal yang terpenting informan penelitian dipilih dengan pertimbangan yang bisa terbuka dan berkenan diikutsertakan dalam kegiatan penelitian. Oleh sebab itu, sejak awal peneliti melakukan upaya building rapport agar terjalin hubungan yang empatik antara peneliti dengan informan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Implementasi Kebijakan Standar Sarana dan Prasarana

Pada saat melakukan wawancara, respon dari informan penelitian berbeda-beda. Ada informan yang langsung benar-benar memahami terhadap arah pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dan menjawab dengan lancar dan ada informan yang belum memahami betul dengan maksud pertanyaan sehingga respon yang diberikan pendek-pendek. Namun, setelah dipancing dengan ilustrasi-ilustrasi dan ungkapan yang sederhana pada akhirnya semua informan bisa bekerja sama dan memberikan informasi yang lengkap terhadap peneliti. Pada akhir penelitian,

peneliti melakukan member check untuk memastikan kebenaran hasil temuan. Peneliti menyampaikan hasil singkat penelitian secara langsung lewat mekanisme FGD.

Penelitian itu bertujuan untuk mengetahui implementasi sarana dan prasarana di TKS PGRI Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Untuk mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian, maka peneliti terlebih dahulu akan menjabarkan dan memberikan penjelasan tema-tema penting yang disampaikan oleh tiap-tiap informan kunci. Setiap kutipan akan disertai dengan kode-kode tertentu agar pembaca lebih mudah untuk memahami dan mudah untuk melakukan kategorisasi dan untuk kemudahan analisis. Hasil penelitian mendapatkan 4 tema besar, yaitu: (1) implementasi kebijakan; (2) dampak yang ditimbulkan; (3) faktor pendorong implementasi; (4) dan faktor penghambat implementasi.

TKS Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep berlokasi di daerah yang agak terpencil, berdekatan dengan berbagai madrasah-madrasah sehingga hal ini yang menjadi salah satu faktor jumlah peserta didiknya tidak terlalu banyak. Meskipun demikian, TKS PGRI Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep berusaha untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan serta menyediakan berbagai sarana dan prasarana sehingga masih banyak masyarakat yang tertarik untuk menyekolahkan anaknya ke TKS PGRI Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

Pada awalnya, TKS PGRI Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep hanya memiliki 3 lokal. 1 lokal difungsikan untuk TK A dan 1 lokal difungsikan untuk TK B, serta 1 lokal sisanya digunakan sebagai ruang guru, ruang kepala sekolah, dan perpustakaan (ruang baca). Namun dalam perkembangannya, ada tambahan 1 lokal lagi yang difungsikan sebagai ruang kesehatan. Selain itu, TKS PGRI Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep juga memiliki dua kamar mandi yang agak luas dan berada di area yang terjangkau dari anak-anak. Di bagian depan dan samping terdapat area bermain yang aman dan rindang karena terdapat beberapa pohon yang menaungi.

Tingkat kepatuhan TKS PGRI Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep bisa dikatakan relatif baik. Hal ini bisa dilihat dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa TKS PGRI Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep memiliki luas 1000m², lahan sekolah terhindar potensi bahaya, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah dan kebisingan. Lahan juga memiliki status hak tanah, memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan yang dapat memenuhi kebutuhan air bersih, saluran air kotor, tempat sampah dan saluran air hujan. Bangunan juga dilengkapi dengan ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai. Berikut hasil salah satu kutipan wawancara dengan informan penelitian:

“kalau mengenai sarana di TKS ini memang seperti ini adanya. Sarana dan prasarana ya sama dengan yang di buku inventaris barang. Cuma tambahannya kursi guru dan kamar mandi, kalau dikatakan lengkap ya belum lengkap namun setidaknya lebih dari cukup untuk membantu kebutuhan anak-anak di sini...” (W1-NB-7).

Pernyataan di atas memang dipertegas dengan buku inventaris barang yang menjadi bahan lampiran. Penyediaan sarana dan prasarana di upayakan bertambah di tiap pergantian tahun. Sebab, kurangnya anggaran atau dana yang ada cukup menjadi kendala dalam menerapkan berbagai aturan yang diberlakukan pemerintah.

Informan lain juga menyampaikan bahwa sarana pendidikan di sekolah TKs PGRI Aengbaja Kenek Bluto Sumenep belum sepenuhnya lengkap, seperti media pembelajaran, bahan, buku, alat bermain di ruang kelas dan alat permainan di luar kelas juga perlu ditambah. Hanya saja sekolah belum memiliki cukup biaya untuk melengkapi sarana yang dimaksudkan.

2. Faktor yang Memengaruhi Penerapan Sarana dan Prasarana

Menurut hasil wawancara dengan salah satu guru kelas, ditemukan data-data yang menunjukkan bahwa guru kadang merasa kesulitan dalam melakukan kegiatan pembelajaran, sehingga tujuan yang diinginkan yaitu agar anak bisa mengembangkan potensinya dengan optimal menemui kendala. Padahal, media pembelajaran yang sejatinya diperlukan untuk menunjang kebutuhan siswa dan meningkatkan antusiasme siswa untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Termasuk juga, masih kurangnya fasilitas bermain yang bersifat edukatif, yang diharapkan bisa menstimulasi koordinasi sensori dan motorik pada anak usia dini.

“Kalau bagi guru, kami merasakan kesulitan untuk menyampaikan materi karena minimnya alat peraga dan media pembelajaran yang bersifat edukatif, dan yang sering terjadi terkadang anak-anak merasa bosan...” (W2-BS-8).

Sementara itu, kendala yang ditemukan dalam implementasi sarana dan prasarana di lingkungan TKS PGRI Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep terdapat dua hal, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yang dihadapi oleh TKS PGRI Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep adalah faktor pendanaan yang kurang memadai dari pemerintah. Sementara itu, kendala eksternal juga berhubungan dengan faktor pendanaan, yaitu TKS PGRI Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep belum bisa mandiri secara pendanaan karena hanya menggantungkan dari program pendanaan yang dari pemerintah. Pada saat yang sama, tidak adanya kucuran dana dari luar sekolah sehingga dalam pengadaan menjadi terbatas.

Namun demikian, sekolah memandang walaupun pada aspek pendanaan pemerintah terbatas, sekolah mendapatkan dukungan pihak luar (eksternal) yaitu mendapatkan dukungan dari orang tua siswa. Adapun bentuk dukungan dari orang tua adalah keikutsertaan orang tua murid dalam perenovasian sekolah, menjaga kebersihan lingkungan, ikut andil dalam pengambilan keputusan saat dilakukan pertemuan rutin sekolah, dan lain sebagainya. Hal ini selaras dengan temuan penelitian lain yang menunjukkan bahwa dukungan dari pelbagai pihak dianggap penting dalam implementasi sarana dan prasarana di lingkungan sekolah. Hal ini berhubungan dengan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi salah satunya adalah mengenai sumber daya, komunikasi, dan sikap terhadap program.

Temuan lain juga menegaskan bahwa kepala sekolah juga melibatkan orang tua saat meminta pertimbangan terkait adanya bantuan apakah akan diperuntukkan bagi anak-anak yang dianggap kurang mampu atau diperuntukkan bagi penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana yang tujuannya juga untuk memenuhi kebutuhan siswa. Kepala sekolah dan para guru di lingkungan TKS PGRI Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep kemudian menyerahkan keputusannya kepada orang tua siswa melalui forum musyawarah karena adanya bantuan memang diperuntukkan untuk kepentingan siswa dan kegiatan pembelajaran. Sehingga keputusan akhir disepakati untuk penambahan sarana dan prasarana.

“waktu ada bantuan, saya langsung meminta orang tua siswa dan komite untuk datang ke sekolah melakukan musyawarah. Nah, karena memang di sini sedang kekurangan kursi, saya minta pertimbangan orang tua, apakah bantuan akan diserahkan kepada siswa atau diperuntukkan pada sarana dan prasarana. Akhirnya disepakati sebagian diperuntukkan untuk sarana dan prasarana...” (W2-AS-8).

Selain itu, terdapat faktor pendukung yang memengaruhi implementasi sarana dan prasarana di lingkungan TKS PGRI Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Faktor pendukung internal adalah adanya

dukungan dari kepala sekolah, guru, dan juga dari komite sekolah. Kepala sekolah berusaha melakukan pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar lewat pengajuan proposal yang ditujukan kepada pemerintah. Selain itu, kepala sekolah dan guru juga melakukan pemeliharaan dan pengawasan terhadap lingkungan fisik sekolah dengan cara mengembalikan peralatan yang digunakan dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Berikut hasil wawancara:

“salah satu yang bisa kita lakukan untuk menambah sarpras terutama media pembelajaran karena media sangat penting untuk mengembangkan berbagai aspek dalam diri anak, jadi yaa mau tidak mau paling tidak tiap tahun saya menambah satu atau dua media. Yang murah murah, tapi ada juga yang agak mahal. Uangnya biasanya saya kumpulkan juga dari uang kas kalau misalnya terkumpul berapa langsung saya belanjakan, bisa buku cerita, ya bisa alat permainan untuk melatih motorik halus anak...” (W2-AS-9).

PEMBAHASAN

TKS PGRI Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep belum sepenuhnya menjalankan ketentuan tentang sarana dan prasarana yang diatur oleh pemerintah. Sesuai kenyataan, TKS PGRI Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep belum memiliki tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara jelas. Yaitu, belum sepenuhnya melakukan penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai standar. Padahal, menurut Grindle (dalam Sugi Rahayu, T., Khosiah, S., & Atikah, C, 2022) menjelaskan bahwa proses implementasi guru akan berlangsung jika tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program disusun dengan baik, dan ketersediaan dana untuk disalurkan.

Hasil data kuantitatif menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan TKS PGRI Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dalam mengimplementasikan kebijakan standar sarana dan prasarana berada pada kategori cukup patuh dengan skor 56. Data ini berlandaskan melalui skala penilaian yang biasanya digunakan dalam dokumen akreditasi. Sesuai dengan penjelasan Dunn (2003) terkait dengan tingkat kepatuhan, maka data-data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat dilihat bahwa TKS PGRI Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep belum sepenuhnya menjalankan prosedur yang dibuat oleh pemerintah.

Hal lain pula yang menjadi persoalan adalah berkaitan dengan administrasi sarana dan prasarana pendidikan yang merupakan keseluruhan proses pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana dan prasarana serta peralatan yang digunakan untuk menunjang setiap kegiatan yang berlangsung di lembaga pendidikan anak usia dini belum sepenuhnya tersusun dengan tepat (Kurniawan, 2017).

Dampak yang terjadi sebagai akibat dari penerapan kebijakan standar sarana dan prasarana yang harus disesuaikan dengan standar yang harus dipenuhi, maka ditemukan beberapa persoalan yang dihadapi guru terutama saat berhadapan dengan aktivitas peminatan yang membutuhkan ruangan dan fasilitas khusus, misalnya aktivitas untuk menunjang kemampuan motorik halus dan kasar pada anak, mengembangkan keterampilan di bidang olah raga, dan lain sebagainya. Hal ini juga berdampak pada optimalisasi guru di TKS PGRI Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep untuk mengembangkan skill dan kompetensi anak. Meskipun demikian, tidak semua guru kemudian menjadi statis melainkan ada beberapa yang melakukan inovasi dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Salah satu yang dilakukan adalah

menggunakan bahan dan alat yang berasal dari lingkungan sekitar atau disebut juga bersumber dari alam.

Dampak lain juga terlihat karena kurangnya efektifitas dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki di lingkungan TKS PGRI Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep proses penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan lain yang semestinya bisa mendukung terhadap tumbuh kembang siswa menjadi kurang optimal. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Dunn (2003) efisiensi dibutuhkan untuk merespons adanya suatu kebutuhan aktual dari adanya suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut William N Dunn, penting untuk melakukan pelbagai evaluasi terhadap suatu proses dalam implementasi suatu kebijakan, sehingga bisa mengarah pada efektivitas dan sumber daya yang ada bisa difungsikan secara lebih optimal.

Selain beberapa dampak yang muncul dalam implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana, faktor pendukung juga menjadi bagian penting dalam suatu kebijakan terlaksananya sarana dan prasarana. Faktor eksternal dan internal merupakan faktor pendukung yang ditemukan dalam penelitian ini. Faktor internal meliputi usaha kepala sekolah dalam melakukan pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar melalui penyusunan proposal natuan kepada pemerintah, dan berupaya melakukan pemeliharaan dan pengawasan terhadap lingkungan fisik sekolah dan perlengkapan media dan alat pembelajaran di ruang kelas. Faktor pendukung lainnya juga berpengaruh, yaitu faktor yang diperoleh dari adanya dukungan dar orang tua siswa.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana di TKS PGRI Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dengan beberapa tema kunci, yaitu; implementasi, dampak, hambatan dan faktor pendukung. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan dalam kebijakan sarana dan prasarana di TKS PGRI Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep termasuk kategori cukup patuh. Hal tersebut menunjukkan bahwa sekolah belum sepenuhnya mematuhi standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226).

Adapun dampak yang ditimbulkan dalam penerapan kebijakan standar sarana dan prasarana yaitu, (1) kurang optimalnya proses belajar mengajar karena masih tidak adanya fasilitas yang bisa menunjang kegiatan belajar terutama yang mendukung pada pengembangan minat, skill, dan tumbuh kembang anak (2) kurang kompetennya guru dalam mengajar. Kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan standar sarana dan prasarana di lingkungan TKS PGRI Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep yaitu terkait dengan kendala pendanaan, baik dari pihak internal maupun eksternal. Sementara itu, faktor pendukung dalam implementasi yaitu adanya dukungan dari pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal didapatkan dari kepala sekolah dan dewan guru dan dukungan eksternal diperoleh dari para orang tua siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, C. (2017). The Effect of School Environment, the Role of Teachers in Learning Process to Student Learning Motivation. *Journal of English Language and Education*, 2(2).
- Cindy, A. H., Sugiyono, S., Usman, H., & Herwin, H. (2022). Factors That Affect the Optimisation of Vocational High School Facilities and Infrastructure. *Cypriot Journal of Educational Sciences*, 17(2), 586-600.
- Creswel, J. W. (1998). *Qualitatif inquiry and research design*. California: Sage Publication.
- Dunn, W. N., & Swierczek, F. W. (1977). Planned organizational change: Toward grounded theory. *The Journal of Applied Behavioral Science*, 13(2), 135-157.
- Dunn, W. N. (2015). *Public policy analysis*. Routledge.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Terjemahan Samodra Wibawa, dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Frank, D.J., Meyer, J.W. (2007). University expansion and the knowledge society. *Theor. Soc.* 36, 287-311.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction Theory and Research*. Canada: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
- Gallagher, J. J., & Clifford, R. M. (2000). The Missing Support Infrastructure in Early Childhood. *Early Childhood Research & Practice*, 2(1).
- Hasanah, R. (2020). Pengaruh manajemen sarana dan prasarana terhadap kegiatan belajar mengajar di TK Al-Fadlillah Maguwoharjo Yogyakarta. *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 5(3), 115-122.
- Jamaluddin, J., Martuty, A., & Abdullah, M. (2021). The infrastructure standards of early childhood education units in south sulawesi province. *KnE Social Sciences*, 584-603.
- Madhani, L., & Patilima, H. (2024). Implementasi Aspek Sarana Prasarana Sekolah Ramah Anak di Taman Kanak-kanak. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 10(1), 8–16.
- Sari, D. C., Maulani, S., & Irma, A. (2024). Pengelolaan Lingkungan Belajar Outdoor Pada Sekolah Berlahan Sempit: (Studi Kasus Raudhatul Athfal (RA) Nurul Ikhwan Desa. Sangiang Kec. Rancaekek). *Thufuli : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 6(2), 13–25.
- Sitati, E. M., Ndirangu, M., Kennedy, B., & Rapongo, G. S. (2016). Implementation of early childhood development education service standard guidelines on physical facilities in public and private early childhood education centres Kakamega County, Kenya. *Early Child Development and Care*, 186(11), 1765-1778.
- Setyaningsih, D. P. (2021). Problematika Manajemen Lembaga Paud Dalam Keterbatasan Sarana Dan Prasarana. *Early Childhood Education and Development Journal*, 3(2), 68-75.
- Seefeldt, C., & A. Wasik, B. (2008). *Pendidikan Anak Usia Dini: Menyiapkan Anak Usia Tiga, Empat, dan Lima Tahun Masuk Sekolah*. Jakarta: Indeks.
- Sugi Rahayu, T., Khosiah, S. ., & Atikah, C. (2022). Implementasi Manajemen Sarana Prasarana Dalam Menunjang Mutu Pembelajaran Di TK. *Jurnal Amal Pendidikan*, 3(3), 242–248.